

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

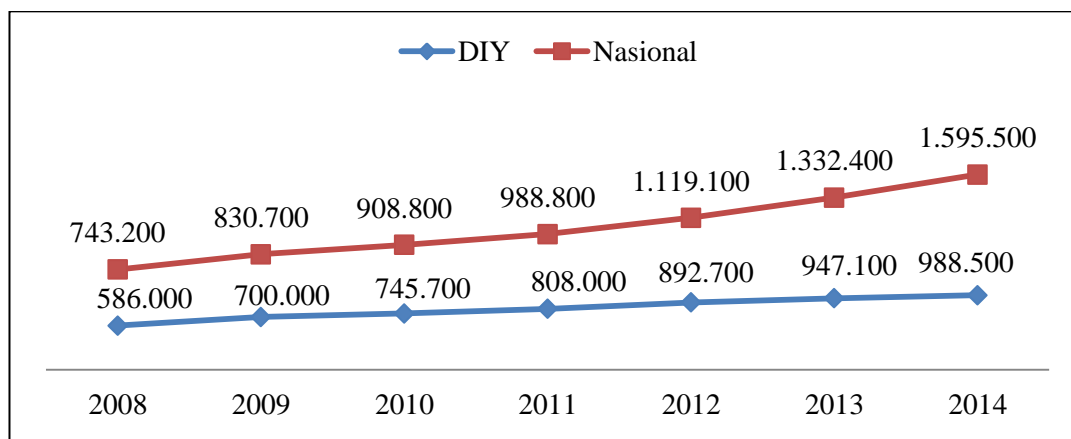
Pada dasarnya fitrah manusia adalah suci dan mulia, bukan sebagai manusia yang kotor dan penuh dosa. Manusia adalah makhluk lemah yang terkadang lalai akan fitrahnya sehingga sangat mudah untuk tergoda akan bisikan-bisikan setan dan jin untuk berbuat buruk. Berdasarkan kisah awal mula manusia, setan dan jin memiliki tugas untuk selalu menggoda umat manusia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT hingga tiba akhir zaman. Inilah yang membuat kebaikan dan keburukan selalu berdampingan. Ketika tidak ada pengaruh atau tekanan yang mengusik maka ia tidak akan berbuat buruk. Begitu pula sebaliknya, ketika terdapat godaan, pengaruh atau tekanan dari luar yang mengusik dirinya, maka sifat buruk akan muncul dalam dirinya. Semua bergantung terhadap iman yang dimiliki dan tekanan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri.

Manusia yang berbuat jahat belum tentu orang jahat. Ada dua faktor yang melandasi seseorang untuk berbuat jahat yaitu faktor intern yang meliputi sifat khusus dan sifat umum dalam diri individu, dan faktor ekstern (Abdulsyani, 1987) dalam Astuti (2014). Sifat khusus dalam diri individu antara lain; sakit jiwa, daya emosional, dan rendahnya mental, sedangkan sifat umum dalam diri individu antara lain; umur, kekuatan fisik, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, dan hiburan. Faktor ekstern dapat mencakup faktor-faktor

ekonomi (perubahan harga, pengangguran, urbanisasi), faktor agama, faktor bacaan, dan faktor film.

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor yang paling sering menjadi alasan seseorang untuk berbuat kejahatan adalah desakan faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah faktor yang sangat penting bagi semua orang untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Kebanyakan dari para pelaku kejahatan atau kriminalitas adalah orang dari golongan tidak mampu dan berpenghasilan rendah.

Menurut Machin dan Meghir (2003) dalam Tresna Maulana (2014), upah atau pendapatan mencerminkan insentif dalam melakukan kejahatan yang memiliki dampak signifikan dan besar pada tingkat kejahatan itu sendiri. Rendahnya upah minimum akan berdampak meningkatkan angka kejahatan (Summerfield, 2006).



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

GAMBAR 1.1

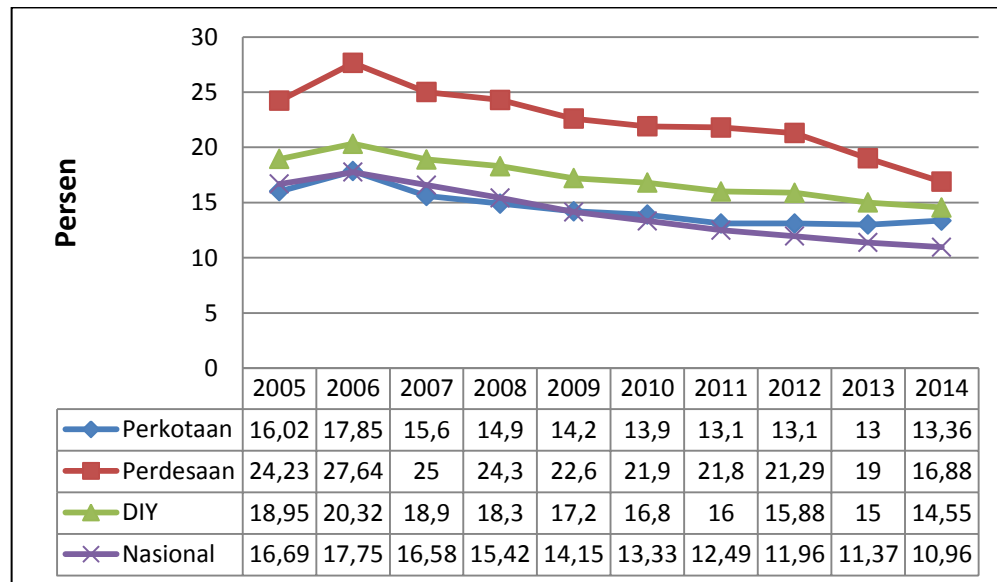
Perkembangan Upah Minimum Provinsi D.I.Yogyakarta dan Upah Minimum Nasional tahun 2008-2014 (Rp)

Data diatas menunjukkan bahwa upah minimum di D.I.Yogyakarta masih tergolong rendah dan selalu jauh dibawah dari UMR Nasional. Pada tahun 2014 tercatat upah minimum nasional sebesar Rp 1.595.500,00 sedangkan upah minimum untuk D.I.Yogyakarta adalah sebesar Rp 988.500,00 yang jauh lebih rendah Rp 607.000,00 dari upah minimum nasional. Rendahnya penetapan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah secara tidak sadar telah membuat para pekerja berada dalam kondisi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (primer). Sehingga menimbulkan niatan melakukan tindakan kejahatan untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kriminalitas oleh karenanya masalah kemiskinan menjadi pemicu utama kejahatan. Kondisi hidup miskin cenderung membuat orang menjadi lebih berani melakukan tindak kejahatan karena hal itu terdorong dari kekurangan hidupnya yang serba kekurangan, sehingga mereka tidak berpikir panjang sebelum melakukan suatu perbuatan (Sri Sulastri, 2011 dalam surat kabar harian Indonesia).

Gambar 1.2 menunjukkan pada data terakhir tahun 2014 tercatat penduduk miskin D.I.Yogyakarta sebesar 14,55 persen dengan persentase tingkat penduduk miskin nasional sebesar 10,96 persen. Ditunjukkan bahwa banyaknya persentase penduduk miskin di D.I.Yogyakarta berada jauh diatas persentase penduduk miskin secara nasional. Hal ini membuat Provinsi D.I.Yogyakarta menjadi provinsi dengan persentase tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa. Persentase tersebut terus turun setiap tahunnya, tetapi tidak merubah D.I.Yogyakarta sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemiskinan yang

tinggi tidak bisa membuat D.I.Yogyakarta lepas dari banyaknya angka kriminalitas yang terjadi.



Sumber: BPS,2014

GAMBAR 1.2

Persentase Penduduk Miskin di D.I.Yogyakarta Tahun 2005-2014 (%)

Pada tabel 1.1 tercatat kriminalitas di D.I.Yogyakarta menurut kepolisian terus mengalami fluktuasi. Tercatat dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, jumlah tindak pidana pada tahun 2010 yaitu sebanyak 17.622 kasus yang dilaporkan. Kemudian turun drastis pada tahun 2011 menjadi sebanyak 6.326 kasus. Penurunan ini sangat berarti bahwa pihak kepolisian mampu mengatasi tindak kriminalitas yang ada di D.I.Yogyakarta, walaupun kembali meningkat tahun 2012 menjadi 8.987 kasus. Pada tahun terakhir, yaitu tahun 2014 angka kriminalitas menjadi sebanyak 7.135 kasus.

TABEL 1.1

Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian D.I.Yogyakarta Tahun 2008-2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Tindak Pidana	5.183	6.988	17.622	6.326	8.987	6.727	7.135

Sumber : Polres/Polresta D.I.Yogyakarta

Walaupun tingkat kriminalitas di D.I.Yogyakarta masih tergolong rendah diantara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, namun apabila tidak diikuti dengan penanganan dan penyelesaian secara cepat justru akan berdampak pada semakin meningkatnya tingkat kriminalitas pada suatu daerah. Ini dikarenakan banyaknya jumlah dari kasus yang dapat diselesaikan merupakan cermin keefektifan kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Berikut adalah jumlah kasus yang dapat diselesaikan menurut provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2008-2014.

TABEL 1.2

Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah di Pulau Jawa Tahun 2008-2014 (%)

Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Metro Jaya	51,47	51,43	59,29	56,99	61,63	71,93	70,30
Jawa Barat	62,07	73,85	53,90	47,98	48,77	42,80	51,27
Banten	52,59	56,51	53,89	60,41	62,99	55,58	34,02
Jawa Tengah	78,27	78,36	90,24	109,41	82,42	87,07	82,50
D.I.Yogyakarta	47,71	38,67	12,83	52,96	36,89	28,27	39,96
Jawa Timur	64,45	68,67	48,04	28,97	23,50	47,60	34,34

Sumber: BPS,2014

Untuk mengatasi masalah kriminalitas, hal yang harus didahului adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan semuanya kembali berpulang kepada hal yang fundamental yaitu pendidikan. Menurut Lochner (2007) mengatakan bahwa semakin rendahnya tingkat pendidikan seseorang (lulusan SD dan SMP) dapat disimpulkan bahwa ketrampilan yang dimilikinya juga lebih rendah dibandingkan dengan para lulusan sekolah menengah hingga universitas, dan waktu luang yang dimiliki oleh lulusan SD hingga SMP akan lebih banyak dibandingkan lulusan SMA hingga universitas.

TABEL 1.3

Tingkat Partisipasi Sekolah Berdasarkan Rata-Rata Lama Sekolah di D.I.Yogyakarta Tahun 2008 - 2014

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,71	8,78	9,07	9,20	9,21	9,33	9,50

Sumber: BPS,2014

Pada tabel 1.3, dimulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014, rata-rata lama sekolah di D.I.Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Tahun 2010 metode perhitungan yang sebelumnya diukur berdasarkan umur 15 tahun ke atas menjadi 25 tahun ke atas sehingga semakin tinggi pendidikan yang diselesaikan maka rata-rata lama sekolah akan meningkat. Tercatat pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah adalah 9,33 tahun atau setara dengan tamatan SMP. Kemudian pada tahun 2014 menjadi 9,5 tahun atau setara dengan murid yang duduk dikelas 1 SMA. D.I.Yogyakarta yang dicap dengan predikat kota pelajar pun belum mampu

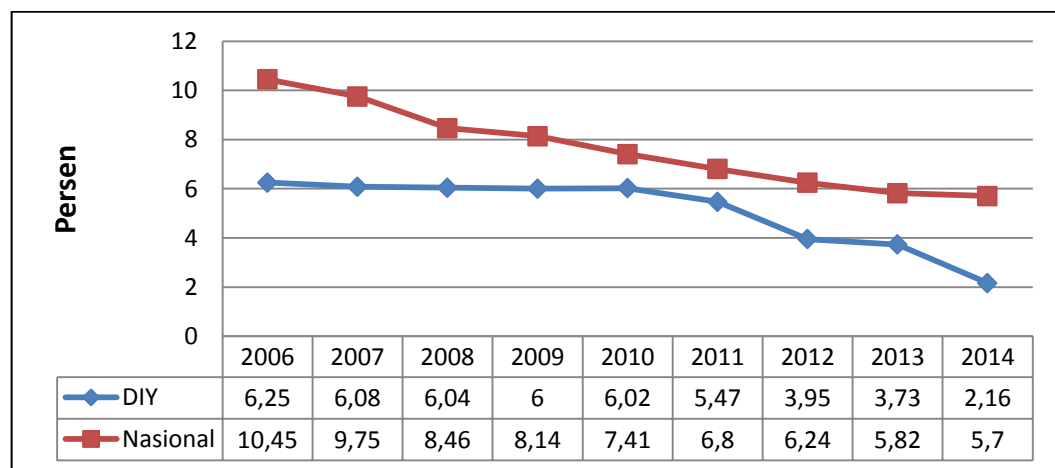
mencapai target dua belas tahun sekolah karena rata-rata sekolah hanya setara dengan tamatan pendidikan SMP atau sama dengan siswa kelas satu SMA.

Semakin sempitnya wawasan dan pendidikan yang diterima akan mempengaruhi seseorang dalam menghadapi persaingan di pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menentukan tingkat upahnya pula. Orang yang memiliki keterampilan tentu akan mendapatkan upah yang berbeda pula dengan yang tidak memiliki keterampilan. Dengan keterampilan terbatas, maka upah yang diterima menjadi rendah yang dapat berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya para pelaku tindak kejahatan melakukan hal ilegal tersebut karena perkiraan kepuasan yang akan mereka dapatkan jauh lebih besar dibandingkan kepuasan yang pasti mereka dapatkan apabila mengikuti hukum yang berlaku atau perbuatan legal (Sullivan, 2007).

Begitu pentingnya faktor pendidikan, seseorang dengan wawasan pas-pasan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan menjadi seorang pengangguran yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak memiliki penghasilan. Tidak adanya penghasilan atau pemasukan ini yang mendorong mereka untuk melakukan segala cara, termasuk melakukan kejahatan untuk dapat memenuhi segala kebutuhan sehari-harinya. Wolpin (1978) dan Wong (1995) (dalam Hardianto, 2009) menyatakan bahwa tingkat pengangguran memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kriminalitas suatu wilayah.

Pada gambar 1.3, pengangguran terbuka di D.I.Yogyakarta terus mengalami penurunan kecuali pada tahun 2010 yang naik sebesar 0,02 persen dari tahun sebelumnya. Tahun 2014 sampai dengan Februari tercatat angka pengangguran terbuka turun menjadi sebesar 2,16 persen. Walaupun tingkat pengangguran mengalami penurunan, tidak dapat dipungkiri bahwa banyaknya tingkat pengangguran masih menjadi suatu permasalahan di setiap daerah.

Pengangguran akan tetap ada selama lapangan kerja yang tersedia sedikit dan kurang memiliki keterampilan. Pengangguran terjadi karena ketidakseimbangan antara daerah dalam penawaran dan permintaan tenaga kerja (Subroto). Semakin tinggi pengangguran maka akan berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS,2014

GAMBAR 1.3

Tingkat Pengangguran Terbuka di D.I.Yogyakarta Tahun 2006-2014 (%)

Pada dasarnya manusia hanya menginginkan kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut membuat seseorang berani

mengambil satu tindakan nekat yang beresiko. D.I.Yogyakarta adalah provinsi yang unik dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi tetapi memiliki problematika kemiskinan yang tinggi pula. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kriminalitas.

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kriminalitas di D.I.Yogyakarta dengan mengambil beberapa faktor ekonomi terkait. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian **“Analisis Pengaruh Pengangguran, Tingkat Upah, Kemiskinan, Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kejahatan Properti (Studi Kasus D.I.Yogyakarta Tahun 2008-2014)”**.

II. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Dalam pasal 362 KUHP, “Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, dengan diancam karena pencurian dengan pidana 5 tahun atau denda paling banyak lima ratus ribu rupiah”. Kejahatan properti memiliki cakupan yang cukup luas yang dijelaskan sesuai dengan KUHP pada buku II tentang kejahatan yang mencakup pencurian (Bab XXII), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII), penggelapan (Bab XXIV), perbuatan curang (Bab XXV), merugikan orang berpiutang atau yang mempunyai hak (Bab XXVI), menghancurkan atau merusak barang

(Bab XXVII), dan penadahan (Bab XXX). Untuk itu penulis lebih mengarahkan kepada kejahatan hak milik seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, percobaan pencurian, penipuan, perampasan, dan penggelapan yang lebih sering terjadi di tengah masyarakat.

2. Daerah yang menjadi obyek penelitian adalah D.I. Yogyakarta yang terdiri dari lima kabupaten/kota antara lain; Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti antara lain; pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan tingkat upah.
4. Dengan adanya keterbatasan data pada beberapa variabel, maka penulis memutuskan bahwa data yang digunakan adalah data tujuh tahun terakhir yaitu dimulai pada tahun 2008-2014.

III. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.
4. Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.

IV. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendidikan terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel kemiskinan terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel pengangguran terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat upah terhadap tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta.

V. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai faktor-faktor ekonomi seperti pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan tingkat upah yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di D.I. Yogyakarta. Tidak hanya menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang hukum.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai tingkat kriminalitas yang ada di D.I.Yogyakarta dan cara pencegahannya.

3. Bagi pemerintah

Membantu pemerintah setempat dalam mengambil sebuah keputusan atau kebijakan untuk menekan tingkat kriminalitas sehingga membuat hidup masyarakat menjadi lebih tentram.

4. Bagi Ilmu pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan kejahatan properti dengan pendekatan ekonomi.